DISKUSI INITIATIVE! — THE INDONESIAN INSTITUTE

Menakar Masa Depan Demokrasi Lokal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Menimbang Preferensi Publik dalam Diskursus Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Dimas Ramadhan

Peneliti, Manajer Riset di Populi Center

Rabu, 15 Juli 2026

SIKAP

Bukan pro atau kontra — posisi kami kondisional

1

Terbuka untuk dibahas

Wacana Pilkada lewat DPRD boleh dibahas secara terbuka. Ini bukan topik tabu.

2

Menuntut standar lebih tinggi

Perubahan seperti ini menuntut standar demokrasi yang justru lebih efisiensi atau biaya.

3

Preferensi publik tak boleh diabaikan

Selama standar itu belum terpenuhi meyakinkan, preferensi publik yang sangat kuat terhadap Pilkada langsung tidak boleh diabaikan.

KONTEKS

Wacana yang Berkembang

DORONGAN KE DPRD

Didorong sebagian elite di parlemen, dengan tiga dalih utama:

- Biaya politik yang tinggi
- Potensi konflik horizontal
- Kasus korupsi kepala daerah

KEPASTIAN HUKUM

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 195/PUU-XXIV/2026

Memberi kepastian hukum atas polemik mekanisme Pilkada (29 Juni 2026).

Tafsir konstitusionalnya → ranah ahli hukum.
Kontribusi saya → legitimasi empiris.

TEMUAN 01

Preferensi Pilkada langsung nyaris konsensus

89,6%

ingin GUBERNUR dipilih langsung

94,3%

ingin BUPATI / WALI KOTA dipilih langsung

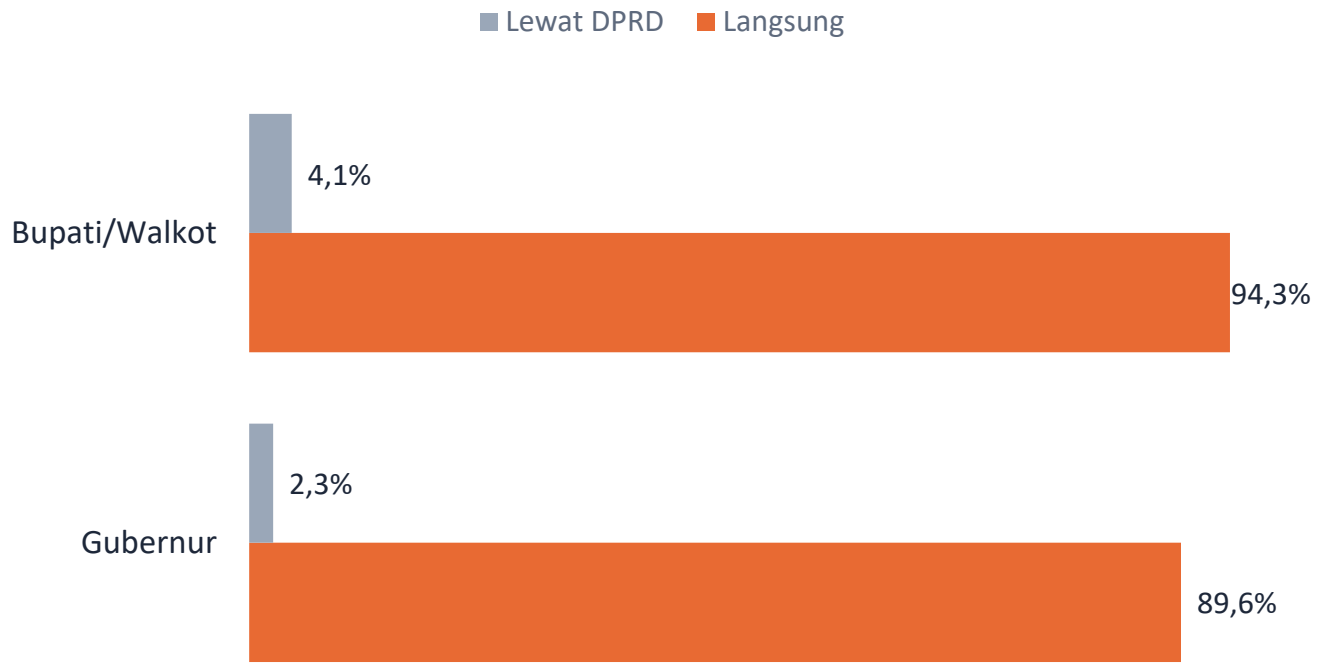

Yang memilih jalur DPRD hanya di kisaran 2–4%.

Sumber: Survei Nasional Populi Center, Oktober 2025 (N=1.200)

TEMUAN 02

Kuat di SEMUA kelompok

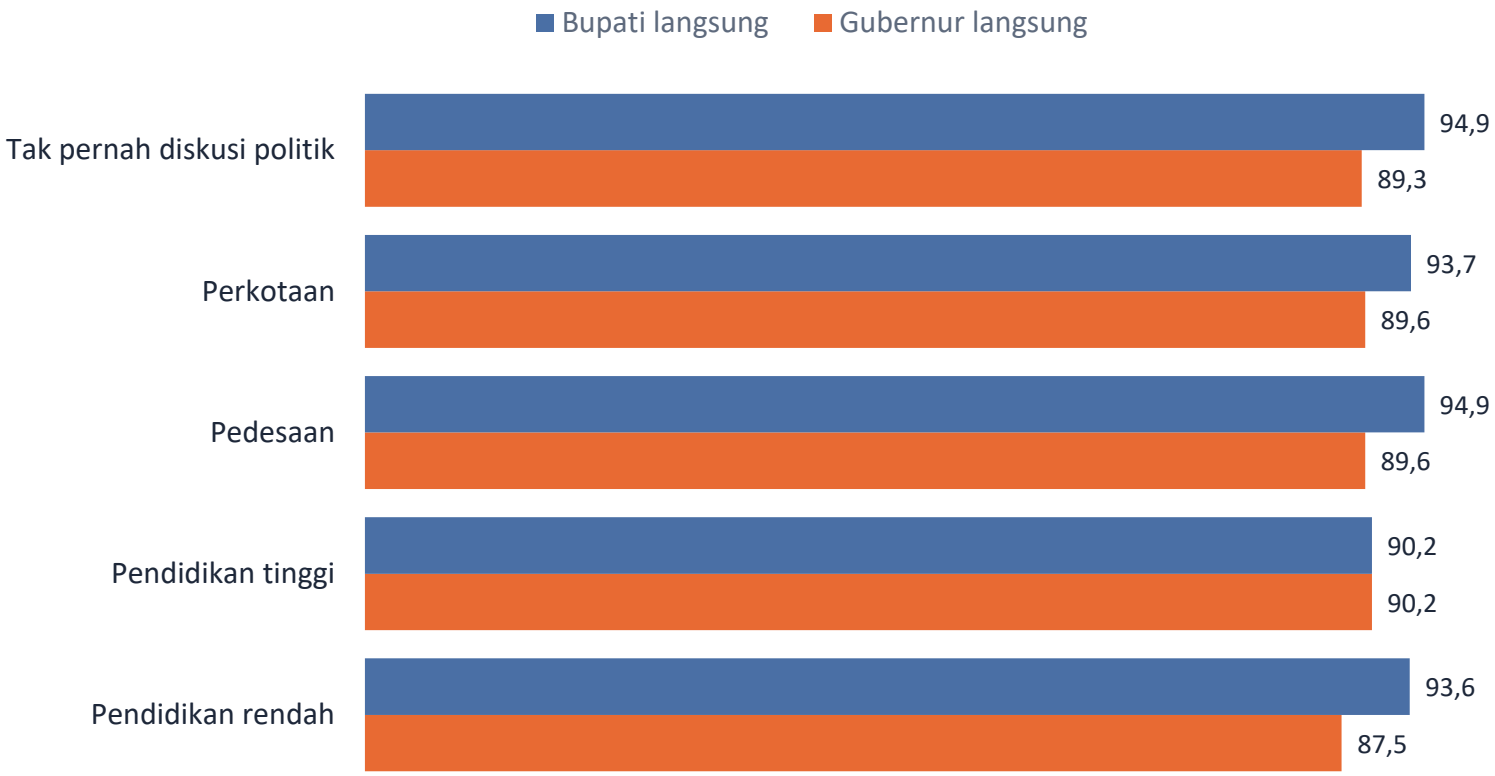

Tidak ada satu pun kelompok di bawah

85%

Faktor seperti tingkat pendidikan, usia, dan wilayah (kota-desa) hampir tak menjelaskan preferensi ini.

Sumber: Survei Nasional Populi Center, Oktober 2025 (N=1.200)

TEMUAN 03

Bukan sekadar ketidakpercayaan

Bahkan di antara yang PALING percaya DPR,

±96%

tetap memilih Pilkada langsung.

Preferensi ini nyaris tidak bergantung pada tingkat kepercayaan lembaga.

Apa artinya?

Godaan yang harus dihindari: menyimpulkan publik mau memilih secara langsung KARENA tidak percaya parpol. Data menolak klaim itu.

Justru sebaliknya: preferensi untuk memilih secara langsung adalah cerminan atas hak pilih itu sendiri, bukan karena semata soal kekecewaan semata.

Preferensi yang berakar pada nilai jauh lebih serius untuk dipertimbangkan daripada penilaian sementara.

Sumber: Survei Nasional Populi Center, Oktober 2025 (N=1.200)

TEMUAN 04

Fondasi 'syarat berat': DPR & partai paling tidak dipercaya

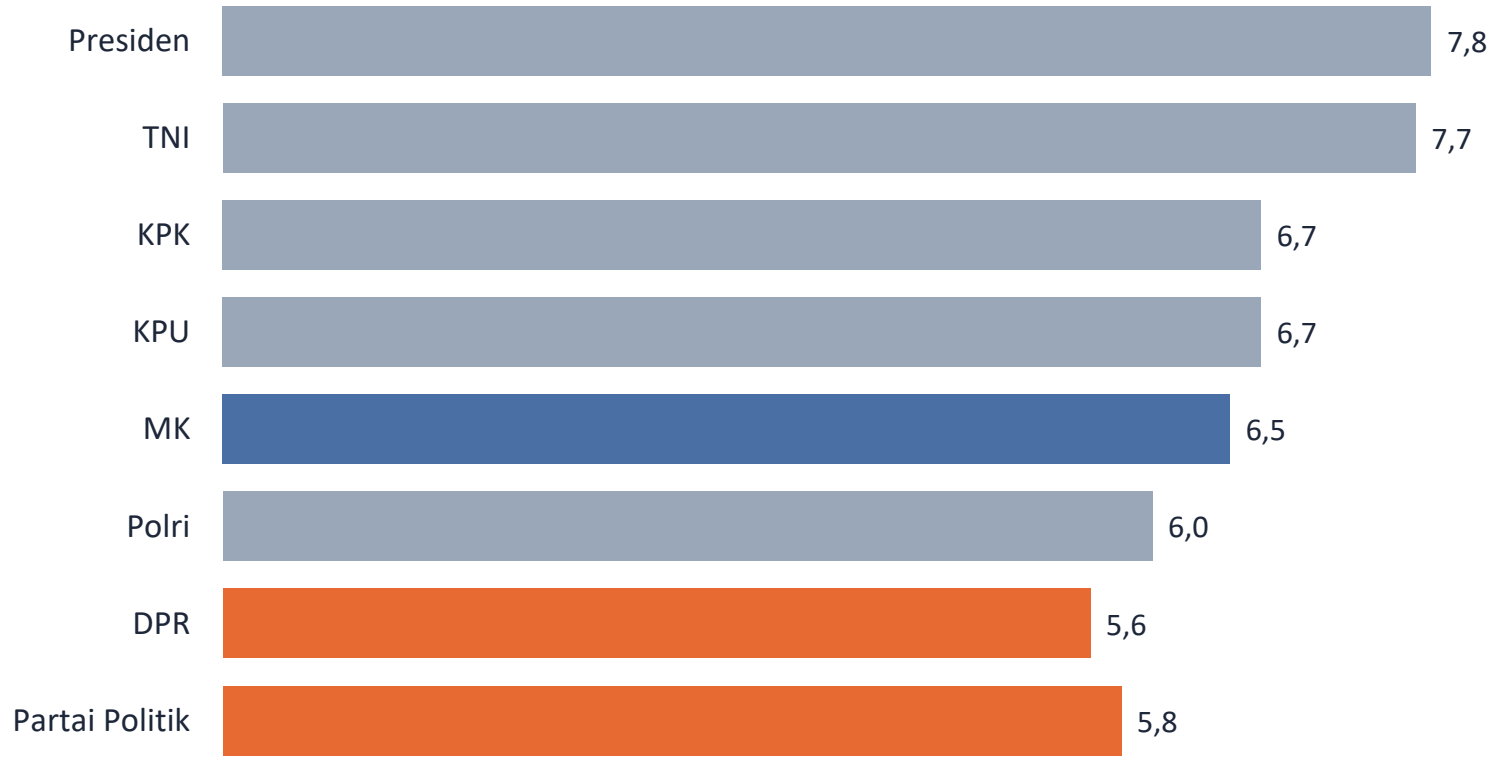

Menyerahkan seleksi kepala daerah ke DPRD =

memindahkannya ke dua lembaga paling tidak dipercaya publik.

Skor rata-rata, skala 1–10

Sumber: Survei Nasional Populi Center, Oktober 2025 (N=1.200)

Gap elite

Gap-nya bukan elite vs publik, tapi elite vs basisnya

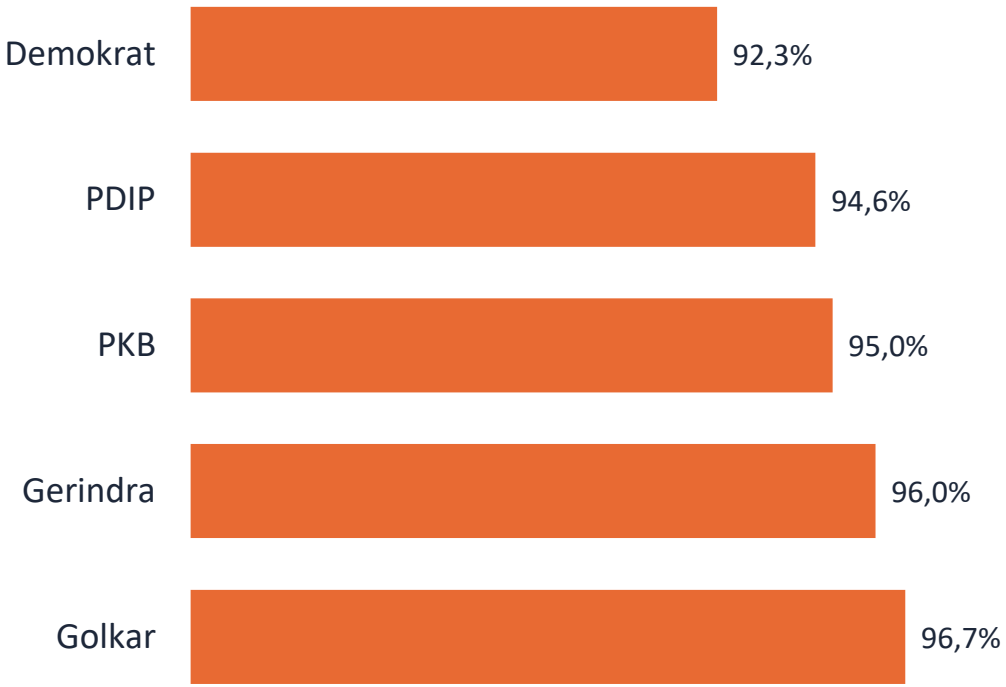

Pemilih partai pengusul DPRD pun mayoritas ingin memilih langsung

Kenapa penting?

Bukan cuma masyarakat umum yang ingin memilih langsung. Pemilih partai pengusul DPRD pun sama.

Artinya partai harus menjelaskan kenapa mereka mengambil arah berbeda dari 90% lebih pemilihnya sendiri.

Sumber: Survei Nasional Populi Center, Oktober 2025 (N=1.200)

DATA PENDUKUNG

Publik menghendaki kontrol langsung — lintas level

84,2%

ingin mencoblos CALON langsung di Pileg, bukan sekadar logo partai.

75,2%

konsisten memilih jalur langsung di KETIGA level: caleg, gubernur, dan bupati.

Sumber: Survei Nasional Populi Center, Oktober 2025 (N=1.200)

SISI YANG HARUS DIAKUI

Kenapa wacana ini tidak bisa ditolak mentah-mentah

1

Konstitusi tidak melarang

UUD menyebut kepala daerah “dipilih secara demokratis”, bukan “dipilih langsung”. Indonesia pernah menerapkannya selama 60 tahun.

2

Bukan berarti tidak demokratis

Banyak negara demokrasi mapan memilih kepala daerah lewat dewan. Tidak langsung bukan sinonim tidak demokratis.

3

Pemerintahan bisa lebih solid

Kepala daerah terpilih langsung bisa saja tak punya dukungan di DPRD, dan programnya macet.

4

Biaya itu nyata

Ongkos negara, ongkos kandidat, dan beban penyelenggaraan bukan keluhan yang dibuat-buat.

Menolak wacana ini tanpa membahasnya justru melemahkan posisi kita sendiri.

SYARAT BERAT

Tiga prasyarat, bukan slogan

1

Reformasi partai politik

Kaderisasi berkelanjutan, seleksi calon transparan, tata kelola akuntabel. Tanpa ini, DPRD = proses tertutup yang elitis.

2

Integritas & keleluasaan DPRD

Anggota bisa menentukan pilihan sebagai wakil rakyat — bukan sekadar menjalankan perintah partai.

3

Mekanisme partisipatif

Konvensi atau pemilihan pendahuluan di daerah untuk memperluas keterlibatan publik & memangkas dominasi elite.

Setiap upaya mengubah mekanisme harus lolos DUA ujian: ujian hukum DAN ujian legitimasi. Data hari ini menunjukkan ujian legitimasi belum akan lolos.

Sumber: Survei Nasional Populi Center, Oktober 2025 (N=1.200)

Soal korupsi

Soal korupsi: batas data, dan pergeseran fokus

YANG TIDAK BISA DIKATAKAN DATA

Survei kami tidak bisa menunjukkan membuktikan mekanisme mana yang lebih bersih dari korupsi.

YANG BISA DIPEGANG

Politik uang subur di KEDUA sistem: Pilkada langsung (biaya kandidasi tinggi) maupun ruang tertutup DPRD (transaksi sulit diawasi).

Mengganti mekanisme tidak menyelesaikan korupsi — hanya memindahkan tempatnya. Yang menekan korupsi: menurunkan biaya politik & mereformasi pendanaan partai — sama beratnya di sistem mana pun.

Sumber: Survei Nasional Populi Center, Oktober 2025 (N=1.200)

KESIMPULAN

1. Preferensi Pilkada langsung nyaris konsensus & merata di semua kelompok.
2. Perubahan ke DPRD hanya sah secara demokratis bila lolos syarat berat.
3. Kepercayaan terendah pada DPR & partai menunjukkan prasyarat itu belum terpenuhi hari ini.
4. Geser fokus debat: bukan 'mekanisme mana', tapi menekan biaya politik & memperbaiki kualitas.

Mengabaikan preferensi sekuat ini bukan hanya berisiko politik — ia berisiko menggerus kepercayaan pada demokrasi itu sendiri.

CATATAN METODOLOGI

Tentang data ini

Survei	Survei Nasional Populi Center, Oktober 2025
Sampel	N = 1.200 responden · wawancara tatap muka
Sifat data	Potret satu titik waktu — belum menggambarkan tren
Jenis pertanyaan	Preferensi 'paling disukai', bukan pilihan berkondisi (trade-off)

Disampaikan agar jernih tentang apa yang bisa dan tidak bisa disimpulkan dari data ini.